

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan karena menjadi dasar bagi seseorang untuk mencapai kemajuan nya di masa depan. Melalui pendidikan, manusia dapat terhindar dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan, serta menjadi sumber daya yang berkualitas (Asmiati et al., 2022). Melalui pendidikan membentuk karakter dan mendorong perubahan sosial budaya (Rahmat, 2010). Pendidikan pada dasarnya sebagai proses sosial dengan mengubah sikap, perilaku dan tindakan individu atau sekelompok orang dengan tujuan mendewasakan manusia melalui institusi pendidikan yang melibatkan interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya sehingga mereka dapat berperan efektif dalam kehidupan bermasyarakat (Damsar, 2011).

Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Negara juga berkewajiban menanggung biaya pendidikan bagi seluruh rakyat. Untuk itu, pemerintah menerapkan program wajib belajar 9 tahun melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008, yang kemudian diperluas dengan kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada 2013 sebagai langkah menuju wajib belajar 12 tahun.

Walaupun negara telah menetapkan jaminan hak pendidikan bagi seluruh warga negara, namun kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Dari penyampaian (Ardianti, et al., 2025) bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu masih menghadapi hambatan dalam

mengakses dan mempertahankan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan ekonomi serta situasi sosial keluarga. Hal ini sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, bahwasannya di negara Indonesia lebih dari 25% rumah tangga miskin mengalami kesulitan yang cukup besar dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka (Yulianingsih, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Dari Portal Data Kementerian Pendidikan Tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2023/2024 masih terdapat 37.856 siswa yang mengalami putus sekolah, dengan penyebab utama ialah keterbatasan kemampuan keluarga dalam membiayai kebutuhan sekolah, seperti perlengkapan, transportasi, dan biaya penunjang lainnya, menyebabkan pendidikan belum menjadi prioritas utama dalam rumah tangga miskin.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak cukup melalui regulasi semata, melainkan harus disertai dengan dukungan pendanaan yang nyata dan berkelanjutan terhadap masyarakat yang membutuhkan (Azizah, 2023). Pendanaan pendidikan sebagai instrumen penting dari pemerintah untuk mencapai generasi penerus bangsa yang beradab dan berwawasan ilmu pengetahuan yang berkualitas serta berkembang kemajuan pemikirannya.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mendukung pendanaan pendidikan bagi keluarga miskin adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan. PKH komponen pendidikan yang dikenal sebagai Conditional Cash Transfers (CCT) adalah bantuan sosial bersyarat yang harus dipenuhi KPM dengan memprioritaskan anak-anak nya untuk bersekolah pendidikan formal minimal hingga jenjang menengah atas. Hal ini sesuai dengan

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mengenai hak dan kewajiban KPM. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa KPM berhak memperoleh akses layanan pendidikan melalui fasilitas yang telah disediakan serta anak dari KPM diwajibkan bersekolah pendidikan formal, baik di sekolah umum, pesantren, lembaga kursus, maupun pendidikan lain yang diakui secara resmi oleh negara dengan tingkat kehadiran minimal 85% dari seluruh hari efektif sebagai bagian dari wajib belajar 12 tahun.

Bantuan sosial PKH pertama kali peluncuran resmi dilakukan oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah pada tanggal 25 Juli 2007 di Gorontalo. Pada tahap awal, PKH dilaksanakan di 7 provinsi dengan total berjumlah 48 kabupaten/kota yang telah melayani sekitar 387.928 KPM. Pada Tahun 2017, diperluas jangkauan PKH ke Kota Bukittinggi dengan kuota awal sebanyak 954 keluarga penerima manfaat melalui mekanisme verifikasi dan validasi data. Kemudian pada tahun 2018, jumlah penerima PKH meningkat menjadi 2.831 keluarga penerima manfaat (Diskominfo Kota Bukittinggi, 2017).

Dalam Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021–2024 bantuan komponen pendidikan secara formal ditujukan kepada keluarga penerima manfaat yang memiliki anak usia sekolah, pada praktiknya penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui ibu dalam keluarga. Kondisi ini didasari oleh pertimbangan kebijakan sekaligus realitas sosial, di mana ibu memiliki peran yang lebih besar dalam pengasuhan anak, pengaturan kebutuhan pendidikan, serta cenderung lebih aktif dalam mengikuti pertemuan kelompok PKH. Penyaluran bantuan kepada ibu ialah sebagai upaya strategis untuk menjamin pemanfaatan

bantuan agar lebih tepat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak (Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021-2024).

Bantuan PKH disalurkan dalam 3 kecamatan di Kota Bukittinggi yaitu Mandiangin Koto Selayan (MKS) dengan 9 kelurahan, Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) dengan 8 kelurahan, dan Guguk Panjang (GP) dengan 7 kelurahan.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Mandiangin Koto Selayan (MKS)	Campago Ipuh	156 KK	130 KK	118 KK	246 KK	245 KK	290 KK
		Campago Guguk Bulek	140 KK	118 KK	114 KK	171 KK	190 KK	217 KK
		Puhun Pintu Kabun	70 KK	62 KK	63 KK	114 KK	129 KK	145 KK
		Kubu Gulai Bancah	79 KK	68 KK	62 KK	96 KK	77 KK	122 KK
		Garegeh	22 KK	14 KK	11 KK	28 KK	32 KK	56 KK
		Pulai Anak Air	78 KK	65 KK	56 KK	102 KK	115 KK	144 KK
		Manggis Ganting	65 KK	53 KK	49 KK	73 KK	63 KK	87 KK
		Koto Selayan	40 KK	36 KK	34 KK	51 KK	48 KK	83 KK
		Puhun Tembok	98 KK	81 KK	76 KK	131 KK	125 KK	180 KK

Sumber: Pendamping PKH Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Pada Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH di Kelurahan Campago Ipuh pada tahun 2024 ialah penerima bantuan terbanyak diantara kelurahan lainnya. Penetapan bertambah atau berkurangnya KPM ditentukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan usulan daerah melalui verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan instrumen SIKS-NG dan Sagis Mobile (Bhakti, 2022). Rekap DTKS Kota Bukittinggi tahun 2024

tercatat Kelurahan Campago Ipuh dengan 4.018 individu dan 1.360 keluarga terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

Beban kerja pendamping PKH disesuaikan dengan kondisi wilayah, sehingga satu pendamping sering menangani lebih dari satu kelurahan (Udiati & Tursilarini, 2020). Tugasnya tidak hanya mendata penerima, tetapi juga memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi agar KPM dapat mandiri. Di Kelurahan Campago Ipuh, pendamping PKH nya yaitu Ibu Riri Helsa, S.KM, yang telah menjalankan tugas menjadi pendamping PKH sejak tahun 2017 hingga 2025. Jumlah dan penempatan pendamping ditentukan oleh Kementerian Sosial yang secara administratif, pendamping ditempatkan di tingkat kecamatan, namun dalam praktiknya mereka tetap mendampingi KPM hingga ke desa atau kelurahan tempat KPM tinggal (Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021-2024).

Secara umum Program Keluarga Harapan (PKH) dimanfaatkan sebagai bantuan sosial bersyarat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin, terutama dalam menunjang pendidikan dengan membeli kebutuhan sekolah anak dari keluarga penerima bantuan agar beban biaya sekolah dapat berkurang (Pangestu & Fedryansyah, 2022). Namun, realitas yang terjadi di Kelurahan Campago Ipuh masih terdapat KPM yang telah menerima bantuan pendidikan dalam jangka panjang. Hal ini terlihat bahwa bantuan tersebut masih dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan akses pendidikan anak karena tanpa dukungan dana bantuan PKH komponen pendidikan, KPM kesulitan dalam memenuhi biaya sekolah.

Tabel 1.2
**Penerima Bantuan Sosial PKH Komponen Pendidikan di Kelurahan
 Campago Ipuh, Kota Bukittinggi Tahun 2025**

No	Komponen	Kategori	Jumlah Anak KPM
1.	Pendidikan	SD	44
		SMP	29
		SMA	19
		SMK	3
Total			95

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, data tersebut menggambarkan rincian penerima PKH komponen pendidikan di Kelurahan Campago Ipuh yang berjalan hingga tahun 2025. Tercatat sebanyak 95 anak KPM yang menerima bantuan pendidikan, dengan jumlah terbanyak berada pada jenjang SD sebanyak 44 anak dan SMP sebanyak 29 anak, disusul oleh SMA sebanyak 19 anak serta SMK sebanyak 3 anak. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga penerima manfaat masih memiliki anak yang berada pada usia sekolah dasar dan menengah, sehingga membutuhkan dukungan biaya pendidikan secara berkelanjutan

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, komponen pendidikan ditujukan untuk anak usia sekolah dalam program wajib belajar 12 tahun, meliputi jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, hingga SMA/SMK sederajat. Sasaran tersebut sejalan dengan upaya percepatan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs)(Kominfo, 2011).

Tabel 1.3
Nominal Bantuan PKH Komponen Pendidikan

No	PKH Komponen Pendidikan	Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)/ 2 Bulan	Kantor Pos/ 3 Bulan	Jumlah Bantuan (Tahun)
1.	Pendidikan	SD	Rp150.000	Rp225.000
		SMP	Rp250.000	Rp1.500.000
		SMA/SMK	Rp334.000	Rp2.000.000

Sumber: Kementerian Sosial RI, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, bantuan sosial PKH komponen pendidikan, jumlah bantuan meningkat sesuai jenjang, dari Rp900.000 per tahun untuk SD hingga Rp2.000.000 untuk SMA/SMK, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar pula biaya dan risiko anak putus sekolah. Bantuan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Kantor Pos tanpa memengaruhi total dana yang diterima dalam setahun. Dengan skema ini, PKH pendidikan berfungsi sebagai upaya perlindungan agar anak KPM tetap dapat melanjutkan sekolah.

Untuk mendorong perubahan perilaku KPM sebagai penerima bantuan PKH pendidikan, dibutuhkan edukasi dari pendamping PKH secara berkelanjutan setiap bulan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session (FDS)*, yaitu pertemuan kelompok yang diberikan sejak tahun pertama kepesertaan PKH. Dalam pelaksanaan PKH, pendamping membentuk satu kelompok beranggotakan 10–20 KPM. Setiap kelompok memiliki struktur kepengurusan, termasuk ketua yang dipilih melalui musyawarah. Pembentukan kelompok didasarkan pada kedekatan tempat tinggal (domisili) serta kesamaan kebutuhan atau jenis bantuan yang diterima.

Di Kelurahan Campago Ipuh terdapat 5 kelompok penerima bantuan PKH komponen pendidikan. Pada Tabel 1.4 Data Penerima Bantuan Berdasarkan Kelompok PKH Komponen Pendidikan di Kelurahan Campago Ipuh Tahun 2025 terdapat di bagian (Lampiran Abjad E). Berdasarkan Tabel 1.4 tersebut, dapat dilihat bahwa kepesertaan PKH komponen pendidikan di Kelurahan Campago Ipuh menunjukkan keragaman, baik dilihat dari jumlah anak yang ditanggung, jenjang sekolah, maupun lamanya KPM menerima bantuan. Dari 56 KPM yang tercatat, mayoritas merupakan penerima baru hingga menengah yang mulai memperoleh bantuan pada rentang tahun 2021 sampai 2025. Kondisi ini menggambarkan bahwa PKH komponen pendidikan terus menjangkau keluarga miskin yang baru masuk dalam data DTKS, sehingga terjadi perluasan penerima bantuan.

Jika dilihat dari tahun pertama memperoleh bantuan PKH komponen pendidikan, lama kepesertaan KPM dapat divariasikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut.

Tabel 1.5
Variasi Lama Kepesertaan PKH Komponen Pendidikan di Kelurahan
Campago Ipuh Tahun 2025

No	Lama Menerima Bantuan	Menerima dari Tahun Awal hingga Berjalan Sampai Saat Ini	Jumlah KPM	Karakteristik Umum	Total KPM
1.	1-2 Tahun	Tahun 2023-Tahun 2025	13	Penerima yang masih berada pada fase awal mengikuti dan baru menyesuaikan diri dengan bantuan PKH komponen pendidikan.	17
		Tahun 2024-Tahun 2025	4		
2.	3-4 Tahun	Tahun 2021-Tahun 2025	10	Penerima yang berada pada fase menengah dan masih dalam masa	33
		Tahun 2022-Tahun 2025	23		

				mendapatkan pendampingan secara intensif.	
3.	>5 Tahun	Tahun 2017-Tahun 2025	2	Penerima yang telah lama menerima bantuan PKH komponen pendidikan namun belum keluar dari kepesertaan bantuan.	6
		Tahun 2018-Tahun 2025	1		
		Tahun 2019-Tahun 2025	3		

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2025

Dilihat dari Tabel 1.5 di atas, lamanya mengikuti PKH komponen pendidikan sebagian besar KPM di Kelurahan Campago Ipuh termasuk dalam kelompok penerima baru hingga menengah, yaitu yang telah menerima bantuan antara satu sampai empat tahun. Sementara itu, hanya terdapat enam KPM yang telah menjadi peserta lebih dari lima tahun. Kelompok ini berada pada kondisi yang berbeda karena sudah melewati batas waktu ideal kepesertaan PKH, tetapi belum mampu mandiri atau belum graduasi. Atas dasar itu, keenam KPM tersebut dipilih sebagai informan karena dianggap paling mencerminkan ketergantungan terhadap bantuan serta pola pemanfaatan PKH pendidikan dalam jangka panjang.

Penelitian dari (Bela & Sarmini 2024) dana bantuan PKH dimanfaatkan KPM untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya sekolah, alat tulis, transportasi, dan uang saku, namun sebagian masih dialihkan ke kebutuhan konsumtif akibat rendahnya pemahaman KPM serta kurangnya sosialisasi dari pendamping. Kemudian sejalan penelitian dari (Putri & Putra, 2024) juga menemukan bahwa bantuan PKH dimanfaatkan untuk perlengkapan sekolah dan kebutuhan kesehatan, tetapi sebagian dana tetap digunakan di luar tujuan program seperti membayar utang atau membeli mainan, sehingga pencapaian tujuan PKH

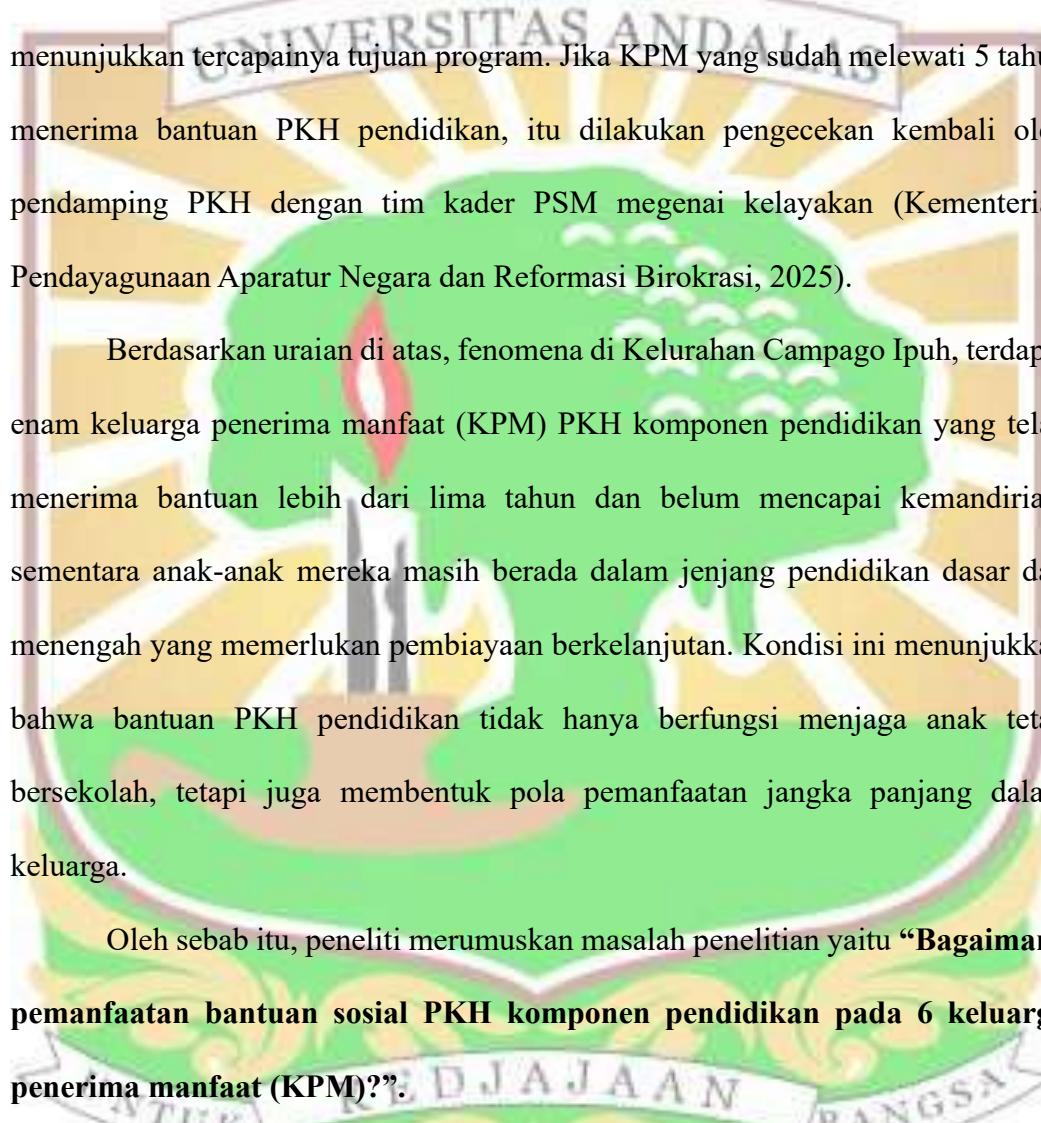
belum optimal. Menyambung dari kedua penelitian di atas, penelitian dari (Pratiwi, 2024), bahwa pendamping PKH berperan penting dalam mendukung pemanfaatan bantuan pendidikan melalui pemberian apresiasi, pendampingan masalah sekolah anak, dan pengelolaan keuangan KPM, Namun, terdapat kekurangan dalam pemanfaatan keterampilan dan sumber daya kelompok antar KPM.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada efektivitas bantuan PKH dan kepatuhan jangka pendek, namun di Kelurahan Campago Ipuh terdapat KPM yang menerima bantuan PKH komponen pendidikan lebih dari lima tahun namun belum mandiri yang menunjukkan bahwa PKH komponen pendidikan berperan dalam menopang pembiayaan pendidikan anak secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika jangka panjang dalam pemanfaatan bantuan PKH yang tidak hanya menjaga anak tetap bersekolah, tetapi juga memengaruhi cara keluarga memaknai tanggung jawab pembiayaan pendidikan.

Dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti melihat “Pemanfaatan Bantuan PKH Komponen Pendidikan (Studi Pada 6 Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendamping PKH Tahun 2025, disampaikan oleh Menteri Sosial bahwa bantuan sosial PKH komponen pendidikan tidak hanya ditujukan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak tetapi juga diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga. Melalui pemberian bantuan tunai yang disertai dengan kemudahan akses pendidikan, KPM diharapkan



mampu memanfaatkan bantuan secara lebih terarah hingga akhirnya dapat keluar dari kepesertaan melalui proses graduasi. Oleh karena itu, keberhasilan PKH tidak hanya dilihat dari keberlangsungan bantuan, melainkan dari kemampuan KPM mencapai kemandirian, di mana semakin cepat proses graduasi terjadi, semakin menunjukkan tercapainya tujuan program. Jika KPM yang sudah melewati 5 tahun menerima bantuan PKH pendidikan, itu dilakukan pengecekan kembali oleh pendamping PKH dengan tim kader PSM mengenai kelayakan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, fenomena di Kelurahan Campago Ipuh, terdapat enam keluarga penerima manfaat (KPM) PKH komponen pendidikan yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun dan belum mencapai kemandirian, sementara anak-anak mereka masih berada dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah yang memerlukan pembiayaan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan PKH pendidikan tidak hanya berfungsi menjaga anak tetap bersekolah, tetapi juga membentuk pola pemanfaatan jangka panjang dalam keluarga.

Oleh sebab itu, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu **“Bagaimana pemanfaatan bantuan sosial PKH komponen pendidikan pada 6 keluarga penerima manfaat (KPM)?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Mendeskripsikan pemanfaatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan pada 6 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pemanfaatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan pada 6 keluarga penerima manfaat (KPM).
2. Mendeskripsikan disfungsi dalam pemanfaatan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan pada 6 keluarga penerima manfaat (KPM).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini secara akademis, diharapkan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan studi Sosiologi Pendidikan mengenai pemanfaatan bantuan PKH di bidang pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan untuk memahami pola pemanfaatan bantuan PKH komponen pendidikan oleh KPM, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan pendampingan dan ketepatan pemanfaatan bantuan bagi kebutuhan pendidikan anak.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Pemanfaatan Bantuan Sosial

Pemanfaatan adalah cara menggunakan atau memanfaatkan sesuatu dari apa yang telah diterima. Bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat dalam bentuk uang maupun barang kebutuhan pokok, yang penyalurnya bersifat selektif sesuai dengan kriteria tertentu. Pemanfaatan bantuan sosial adalah suatu proses penggunaan dana atau fasilitas yang disalurkan pemerintah kepada keluarga penerima bantuan dengan tujuan membantu meringankan beban ekonomi untuk memperoleh akses pada pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan (Marchania, 2024).

Menurut perspektif Midgley (2014) dalam buku nya “*Social development: Theory & Practice*”, pemanfaatan bantuan dapat pula dilihat sebagai upaya rumah tangga menjaga keberlangsungan hidup sekaligus memperkuat kapasitas, termasuk melalui investasi pada pendidikan dan layanan dasar sebagai bagian dari penguatan *human capital*. Pemanfaatan bantuan sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas menggunakan dana atau barang, tetapi sebagai suatu bentuk tindakan sosial. Ketika keluarga penerima manfaat (KPM) menggunakan dana bantuan sosial, pilihan mereka didasari oleh kebutuhan nyata, relasi keluarga, serta norma dan harapan sosial, sehingga perilaku ini bukan semata tindakan acak, melainkan perwujudan dari tindakan sosial yang bermakna.

Secara normatif, UU No. 11 Tahun 2009 bantuan sosial diberikan agar individu/keluarga yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial tetap dapat hidup secara wajar, dengan bentuk intervensi meliputi bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan. Berikut bentuk-bentuk pemanfaatan bantuan sosial terbagi dalam kategori:

1. Pemanfaatan untuk Kebutuhan Dasar (Fungsi Protektif)

Pemanfaatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga rutin untuk menjaga agar keluarga tetap hidup wajar dan memenuhi kebutuhan dasar pangan, seperti: Bantuan BPNT/sembako yang digunakan untuk membeli beras, telur, minyak goreng, BLT (Bantuan Langsung Tunai) dipakai untuk belanja dapur, bayar listrik dan air dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

2. Pemanfaatan untuk Kebutuhan Pendidikan (Fungsi Penguatan Kapabilitas)

Pemanfaatan ini untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan anak penerima bantuan agar dapat memprioritaskan keberlanjutan sekolah nya, seperti: Bantuan PKH yang dana nya dipakai untuk membeli seragam sekolah, sepatu, tas, buku, transportasi sekolah, kemudian PIP (Program Indonesia Pintar) dipakai untuk kebutuhan sekolah/kuliah, uang saku serta perlengkapan belajar anak.

3. Pemanfaatan untuk Perlindungan Risiko (Fungsi Buffer)

Pemanfaatan ini digunakan sebagai penyangga saat keluarga menghadapi krisis seperti: Bantuan PKH digunakan untuk biaya berobat anak yang sakit serta Bantuan Darurat Sosial pada BLT digunakan saat ada musibah. Bantuan ini digunakan untuk bertahan hidup jika dalam keadaan yang sangat krisis.

4. Pemanfaatan untuk Penguatan Akses dan Kelembagaan

Bantuan yang diberikan pemerintah kepada keluarga tidak mampu berfungsi membuka akses mereka terhadap sistem layanan sosial seperti: Bantuan PKH melalui perantara pendamping PKH yang memberikan akses bantuan dari pusat ke sekolah, layanan kesehatan BPJS, DTKS, layanan pendidikan KIP/PIP sehingga bantuan tersebut sebagai pintu masuk ke layanan negara.

1.5.2 Keluraga Penerima Manfaat

Keluarga penerima manfaat (KPM) adalah rumah tangga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan pemerintah sebagai penerima bantuan sosial, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Penetapan tersebut didasarkan pada pendekatan *Cost of Basic Needs* (CBN) atau kebutuhan dasar, yakni perhitungan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik makanan maupun non-makanan. Dengan kata lain, seseorang digolongkan miskin apabila penghasilannya tidak mampu menutupi kebutuhan dasar bulanan, baik untuk konsumsi makanan maupun kebutuhan lainnya (Badan Pusat Statistik, 2025).

KPM dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam situasi kerentanan secara struktural. Giddens (2009) dalam “*Sociology*” menjelaskan bahwa kemiskinan berkaitan dengan posisi sosial yang menyebabkan individu atau keluarga memiliki keterbatasan. Dalam kajian kesejahteraan sosial, Midgley (2014) menjelaskan bahwa penerima bantuan sosial termasuk dalam kelompok *population at risk*, yaitu masyarakat yang sangat rentan jatuh lebih dalam kemiskinan jika tidak mendapat perlindungan negara. Mereka memiliki keterbatasan dalam modal sosial,

pendidikan, dan akses kerja sehingga sebagai kelompok rentan ini perlu didorong dan diperkuat kemampuannya agar dapat keluar dari kondisi kemiskinan.

Bantuan yang diberikan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, melainkan juga berfungsi sebagai sarana perlindungan sekaligus upaya meningkatkan kemandirian dalam keluarga miskin yang memiliki anak sekolah, seperti KPM penerima bantuan PKH komponen pendidikan yang harus memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membiayai pendidikan anak. Oleh karena itu, KPM tidak hanya bersifat sebagai penerima dana, tetapi berjuang mencegah kemiskinan berlanjut pada generasi berikutnya.

Kemudian sebagai penerima bantuan PKH, seluruh anggota KPM diwajibkan untuk memenuhi ketentuan kepesertaan. Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban akan berpengaruh langsung terhadap hak yang diterima. KPM yang mematuhi aturan akan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan program, sedangkan bagi yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi penangguhan bahkan penghentian bantuan sosial. Selain itu, data KPM diverifikasi dan divalidasi secara rutin untuk memastikan ketepatan sasaran, meminimalisir kesalahan penyaluran, dan meningkatkan efektivitas program (Sius, 2024).

1.5.3 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan. Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019, program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; meringankan beban pengeluaran serta mendorong peningkatan pendapatan;

membentuk perubahan perilaku menuju kemandirian keluarga dalam memanfaatkan layanan dasar; menekan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial bagi KPM. Sasaran PKH ditetapkan melalui Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola BPS. Dari data tersebut ditentukan calon penerima sesuai kriteria pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan atau desa. Penetapan peserta dilakukan oleh direktur yang berwenang dalam penyelenggaraan program (Hasmini et al., 2021).

Syarat fakir miskin dan orang tidak mampu teregister berhak menerima bantuan PKH sesuai dengan Permendes No. 146 Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Tidak memiliki pekerjaan tetap, atau memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar
2. Sebagian besar pengeluaran hanya untuk kebutuhan makan pokok secara sederhana
3. Kesulitan berobat ke tenaga medis kecuali layanan yang disubsidi pemerintah, seperti Puskesmas
4. Tidak mampu membeli pakaian baru minimal sekali setahun bagi seluruh anggota keluarga
5. Hanya mampu menyekolahkan anak sampai tingkat SMP
6. Kondisi rumah tidak layak berupa dinding dari bambu/kayu/tembok kualitas rendah atau sudah rusak
7. Lantai rumah dari tanah, kayu, semen/keramik dengan kualitas buruk
8. Atap rumah dari ijuk, rumbia, genteng, seng atau asbes dengan kondisi tidak layak atau kualitas rendah

9. Sumber penerangan bukan dari listrik resmi atau menggunakan listrik tanpa meteran
10. Luas lantai rumah kurang dari 8 m² per orang

11. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan, atau sumber lain yang tidak layak

Kemudian ketentuan penyaluran bantuan PKH didasarkan yaitu mulai dari bantuan hanya diberikan kepada KPM yang memenuhi syarat kepesertaan, menjalankan kewajiban program, dan mengikuti pertemuan P2K2 setiap bulan. Besaran bantuan ditetapkan melalui SK Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, bantuan terdiri atas dua jenis bantuan tetap dan bantuan komponen. Bantuan tetap bersifat stimulan untuk mendukung kebutuhan dasar keluarga, sedangkan bantuan komponen diberikan sesuai kondisi keluarga, meliputi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, setiap keluarga hanya bisa menerima bantuan maksimal untuk 4 orang anggota, penyaluran dana dilakukan secara non tunai dari kas negara ke lembaga penyalur pada setiap tahap pencairan.

1.5.4 PKH Komponen Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018, PKH komponen pendidikan adalah kategori kepesertaan PKH yang melekat pada keluarga miskin-rentan karena memiliki anak usia sekolah atau usia wajib belajar yang harus dijaga keberlanjutan pendidikan nya. Penerimaan bantuan ini memiliki syarat yaitu anak usia wajib belajar mulai dari jenjang SD,SMP hingga SMA/SMK diwajibkan mengikuti proses pembelajaran di sekolah dengan tingkat kehadiran

minimal 85 % dari seluruh hari efektif pembelajaran. Bantuan ini diberikan dengan tujuan agar keluarga penerima manfaat tetap bisa mengakses pendidikan yang layak meskipun terkendala faktor ekonomi.

Proses pembelajaran seharusnya menempatkan anak sebagai subjek yang aktif agar pengalaman belajar menjadi lebih bermakna. PKH komponen pendidikan mendorong orang tua agar lebih memperhatikan pendidikan anak dengan membantu pemenuhan berbagai kebutuhan sekolah, seperti biaya transportasi, uang sekolah, dan perlengkapan lainnya. Dengan adanya peningkatan akses terhadap pendidikan, anak-anak tetap mengikuti proses belajar secara lebih optimal dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan (Khalifah et al., 2023).

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang pendidikan juga terintegrasi dengan Program Indonesia Pintar (PIP) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kolaborasi ini bertujuan memperluas kesempatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui PIP dan KIP, siswa memperoleh tambahan bantuan dana pendidikan yang mendukung pelaksanaan PKH, khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (Zamaludin et al., 2024).

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Robert K Merton. Merton memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tersusun struktur dan institusi yang saling berkaitan serta memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keberlangsungan sistem tersebut. Dalam

buku “*Teori Sosiologi Modern Edisi ke-6*” (1949/1968:105), Merton mendefenisikan fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Merton mengembangkan pendekatan antara fungsi nyata (manifest) dan fungsi tersembunyi (laten). Fungsi nyata ialah fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi tersembunyi adalah fungsi yang tak diharapkan, namun tetap muncul dalam praktik sosial. Merton memberikan konsep ini disaat melihat institusi perbudakan di masyarakat selatan Amerika Serikat, yang secara manifest berfungsi meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi secara laten juga menghasilkan kelas sosial bawah yang justru memperkuat status sosial kelompok kulit putih, baik yang kaya maupun miskin (Ritzer, G. dkk, 2010).

Melalui gagasan tersebut, Merton menekankan bahwa struktur sosial tidak selalu membawa dampak yang menguntungkan. Ia mengkritik pandangan fungsionalisme yang cenderung melihat penyesuaian sosial hanya dari sisi positif, karena dalam kenyataannya suatu institusi sosial dapat menimbulkan dampak yang tidak hanya positif, namun juga bisa negatif pada bagian lain dalam sistem sosial. Dari sinilah Merton mengembangkan konsep disfungsi, yaitu konsekuensi dari suatu struktur atau tindakan sosial yang justru menghambat, melemahkan, atau merugikan sistem sosial.

Dalam penelitian ini, Teori Struktural Fungsional Merton digunakan untuk memahami pemanfaatan bantuan sosial PKH komponen pendidikan sebagai suatu tindakan sosial yang memiliki fungsi manifest, fungsi laten, sekaligus potensi disfungsi. Fungsi manifest atau fungsi yang diharapkan dari bantuan sosial PKH

komponen pendidikan terlihat ketika dana bantuan digunakan KPM untuk kebutuhan sekolah anak, sehingga bantuan yang diberikan menumbuhkan tanggung jawab orang tua dalam memotivasi anak agar dapat bersekolah secara konsisten. Namun seiring dengan diterimanya bantuan secara rutin dan dalam jangka waktu panjang pemanfaatan bantuan PKH komponen pendidikan juga melahirkan fungsi laten, yaitu konsekuensi-konsekuensi yang tidak direncanakan dalam tujuan program. Menurut Merton, fungsi laten bisa membawa pengaruh yang baik ataupun buruk karena adanya akibat sosial yang tidak disadari oleh pelaku. Apabila keberadaannya memperkuat sistem sosial, maka disebut fungsi laten positif, sedangkan jika justru melemahkan atau menghambat jalannya sistem sosial, maka disebut fungsi laten negatif tergantung pada dampaknya terhadap sistem sosial.

Dalam kehidupan KPM, sebagian bantuan PKH komponen pendidikan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga ataupun biaya kesehatan. Pemanfaatan ini umumnya tidak dianggap sebagai penyimpangan, melainkan sebagai upaya keluarga untuk bertahan dalam keterbatasan ekonomi. Dalam pandangan Merton, fungsi laten yang terjadi secara berkelanjutan dapat berkembang menjadi disfungsi. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut tampak ketika bantuan PKH komponen pendidikan yang seharusnya bersifat sementara justru sebagai sumber utama pembiayaan sekolah anak. Hal ini terlihat pada ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan yang melemahkan dorongan KPM untuk mencari alternatif pembiayaan maupun meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, melalui Teori Struktural Fungsional Robert K. Merton, penelitian ini memandang bantuan PKH pendidikan sebagai fenomena sosial yang sekaligus menghasilkan fungsi manifest, fungsi laten, dan disfungsi, terutama pada KPM yang menerima bantuan dalam jangka waktu lebih dari lima tahun.

1.5.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan keterkaitan antara teori yang digunakan dengan pemanfaatan bantuan PKH pendidikan. Berikut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Teori Struktural Fungsional, Merton 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa pemanfaatan bantuan sosial PKH komponen pendidikan pada 6 keluarga penerima manfaat (KPM) di

Kelurahan Campago Ipuh, jika dianalisis melalui Teori Fungsional Robert K Merton, setiap tindakan sosial memiliki fungsi yang mendukung sistem sosial terdiri dari fungsi manifest atau nyata yang diharapkan, fungsi laten atau tersembunyi yang tidak diharapkan namun bisa membawa pengaruh positif maupun negatif serta disfungsi atau akibat dari tindakan sosial yang merugikan atau melemahkan sistem sosial. Fungsi manifest dari bantuan PKH pendidikan ialah setiap tahap bantuan dicairkan, KPM memanfaatkannya sesuai dengan tujuan program bantuan untuk kebutuhan pendidikan anak seperti membeli seragam, buku, alat tulis, tas, sepatu, topi, dasi, kaus kaki, ikat pinggang, biaya transportasi, les tambahan, biaya mengaji anak hingga biaya paket data internet anak. Hal ini memperlihatkan bahwa kebiasaan tersebut bukan sekadar terjadi sekali, melainkan sudah menjadi pola yang terus berulang (*recurrent patterns*) di kalangan penerima bantuan dan kebiasaan menggunakan bantuan PKH untuk keperluan pendidikan telah diterima oleh masyarakat dan didukung oleh kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial serta pendamping PKH. Dengan begitu, tindakan sosial tersebut sudah melembaga (*institutionalization*) dalam sistem sosial karena diatur dan memiliki nilai penting bagi upaya meningkatkan pendidikan anak.

Meskipun PKH komponen pendidikan memiliki fungsi utama untuk membantu pembiayaan sekolah anak, dalam praktiknya sebagian KPM juga memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan lain di luar pendidikan sebagai bentuk fungsi laten. Penggunaan dana bantuan yang melebar di luar pendidikan oleh KPM terjadi karena merasa berhak dan terbiasa menerima bantuan. Kondisi ini

memunculkan disfungsi berupa pemanfaatan yang kurang optimal serta ketergantungan bantuan, sehingga menghambat tercapainya kemandirian keluarga.

Menurut Robert K. Merton, disfungsi terjadi ketika suatu tindakan sosial menimbulkan akibat negatif bagi bagian-bagian tertentu dalam sistem tersebut. Disfungsi itu tidak boleh diabaikan, karena suatu tindakan atau struktur sosial bisa saja berdampak merugikan bagi sistem. Suatu struktur sosial mungkin tetap bertahan meskipun bersifat disfungsional bagi sebagian sistem, sebab masih memberikan manfaat bagi pihak atau kelompok tertentu di dalamnya.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan bantuan PKH pendidikan tidak hanya menjaga keberlanjutan anak tetap bersekolah, tetapi juga membentuk cara pandang KPM terhadap pendidikan, karena bantuan yang diterima terus-menerus dipersepsikan sebagai sumber utama pembiayaan sekolah sehingga mengurangi dorongan orang tua untuk mencari alternatif lain dalam mendukung pendidikan anak.

1.5.7 Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain dan penelitiannya itu berkaitan dengan topik penelitian skripsi peneliti. Penelitian relevan membantu peneliti menemukan kesenjangan, acuan dalam melaksanakan penelitian baru serta berfungsi sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian peneliti mengenai pemanfaatan bantuan PKH komponen pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 1.6
Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Temuan	Perbedaan
1.	Zahrah Indah Pratiwi (2021) Universitas Andalas	Analisis Peran Pendamping dalam Meningkatkan Pendidikan Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan?	Bagaimana peran pendamping dalam upaya meningkatkan pendidikan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan?	Untuk mendeskripsikan peran pendamping dalam upaya meningkatkan pendidikan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan.	Pendamping PKH cukup maksimal dalam mendukung pendidikan anak KPM. Hal ini terlihat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan PKH, pemberian apresiasi bagi anak berprestasi, penyampaian informasi tentang bantuan lain, penyelesaian masalah pendidikan, serta pelatihan melalui P2K2 termasuk bimbingan pengelolaan keuangan keluarga. Namun, terdapat kekurangan dalam pemanfaatan keterampilan dan sumber daya kelompok, serta lemahnya koordinasi dengan pihak sekolah yang membuat pengawasan perkembangan pendidikan anak KPM belum optimal.	Penelitian ini berfokus pada peran pendamping PKH dalam meningkatkan pendidikan KPM. Subjek penelitian aktor eksternal KPM, lokasi penelitian Kota Bukittinggi. Menggunakan teori Community Worker yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero.

2.	Klarisha Viona Amanda & Khairussalam (2022) Jurnal HUMA Universitas Lambung Mangkurat	Perilaku Penerima Program Bantuan PKH Bidang Pendidikan Dalam Menginterpretasi Bantuan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19.	<p>1. Bagaimana perilaku KPM PKH di Desa Gedambaan dalam memanfaatkan dana bantuan PKH komponen pendidikan?</p> <p>2. Bagaimana peran dan upaya pendamping PKH dalam mengatasi masalah anak putus sekolah?</p>	<p>1. Untuk mengetahui perilaku KPM PKH dalam penggunaan dana bantuan pendidikan.</p> <p>2. Untuk mengetahui peran dan strategi pendamping PKH dalam menangani kasus anak putus sekolah.</p>	<p>Selama masa pandemi Covid-19, sebagian KPM tidak menggunakan dana PKH pendidikan sesuai tujuan, karena anak tidak mengikuti sekolah daring dan lebih banyak membantu ekonomi keluarga sehingga bantuan yang seharusnya untuk kebutuhan sekolah justru dialihkan ke kebutuhan rumah tangga. Hal ini menimbulkan masalah anak putus sekolah, sehingga pendamping PKH melakukan upaya seperti kunjungan rumah, mediasi, edukasi tentang pentingnya pendidikan, serta melibatkan pihak sekolah.</p>	<p>Penelitian ini menelaah praktik pemanfaatan bantuan PKH komponen pendidikan oleh KPM selama masa pandemi Covid-19, termasuk peran pendamping dalam merespon persoalan anak yang putus sekolah. Penelitian dilakukan di Desa Gedambaan, Kec.Pulau Laut Sigam. Menggunakan Teori Fungsional AGIL Talcott Parsons dan Teori Tindakan Sosial Max Weber.</p>
3.	Wimmy Haliim dan Andy Ilman Hakim (2024) Jurnal Kebijakan Pemerintahan	Ketergantungan Masyarakat Miskin dan Dilema Kebijakan Sosial: Studi Pada Implementasi Bantuan Sosial PKH.	<p>1. Bagaimana bentuk patologi birokrasi dan patologi sosial dalam implementasi kebijakan sosial PKH?</p> <p>2. Bagaimana dampak kebijakan PKH terhadap masyarakat penerima bantuan?</p>	<p>1. Untuk mengidentifikasi bentuk patologi birokrasi dan patologi sosial dalam implementasi kebijakan sosial PKH.</p> <p>2. Menganalisis dampak kebijakan PKH terhadap masyarakat penerima bantuan.</p>	<p>Dalam pelaksanaan PKH, sebagian aktor memanfaatkan kelemahan sistem untuk kepentingan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan, sementara di sisi lain terlihat kecenderungan ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan pemerintah yang tercermin dari terus bertambahnya jumlah penerima PKH setiap tahun.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada kebijakan sosial berupa patologi birokrasi dan patologi sosial dengan penyalahgunaan dana bantuan, konsumtif, ketergantungan bantuan hingga kecemburuan sosial dan konflik antarwarga. Lokasi penelitian di Kab. Malang, Jawa Timur.</p>

4.	Deni Setiawan et.al (2024) Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan	Efektivitas Program Bantuan Pendidikan Bagi Anak-Anak Miskin dan Berprestasi.	1. Bagaimana keefektifan program bantuan pendidikan bagi anak-anak miskin dan berprestasi siswa siswi yakni Program Indonesia Pintar (PIP)?	1. Untuk mengetahui apakah program bantuan pendidikan efektif untuk menunjang akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu?	Bantuan PIP terbukti memperluas akses pendidikan dan meningkatkan motivasi belajar siswa dari keluarga miskin melalui sosialisasi yang luas serta perbaikan akses layanan, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya tepat karena sebagian dana masih dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga akibat tekanan ekonomi dan rendahnya pemahaman orang tua.	Penelitian ini mengkaji keefektifan serta pemanfaatan bantuan pendidikan program PIP bagi anak-anak miskin dan berprestasi siswa siswi SMA. Lokasi penelitian Yogyakarta. Teknik analisis data kuantitatif.
5.	Abdul Rojak & Agus Sahyono (2025) Jurnal Maneksi (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)	Pengaruh Kemampuan Teman Sosial Terhadap Efektivitas Penggunaan Bantuan Sosial PKH Oleh KPM.	1. Bagaimana tingkat kompetensi pendamping sosial? 2. Seberapa efektif penggunaan dana oleh KPM? 3. Apakah terdapat pengaruh signifikan kompetensi pendamping sosial terhadap efektivitas penggunaan dana PKH?	1. Mengukur tingkat kompetensi pendamping sosial di Desa Sukawali. 2. Menilai efektivitas penggunaan dana PKH oleh KPM. 3. Menganalisis pengaruh kompetensi pendamping terhadap keberhasilan program.	Kompetensi pendamping sosial, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan dana PKH. Semakin baik kompetensi pendamping, semakin efektif penggunaan dana PKH oleh KPM. Karena itu, diperlukan pelatihan berbasis kompetensi agar kinerja pendamping lebih maksimal.	Berfokus pada pengaruh kompetensi pendamping sosial terhadap efektivitas penggunaan dana PKH. Lokasi penelitian di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kab. Tangerang. Teori kompetensi Spencer, MSDM, Teknik analisis data kuantitatif.

Sumber: Data Primer 2025

Dari penjelasan Tabel 1.6 di atas, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu karena sama-sama melihat penggunaan bantuan pendidikan untuk menunjang sekolah anak, meskipun tidak seluruh dana digunakan sesuai tujuan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, lokasi penelitian, unit analisis, dan teori yang digunakan. Penelitian ini secara khusus meneliti pola pemanfaatan serta ketergantungan jangka panjang KPM terhadap PKH pendidikan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan KPM penerima lebih dari lima tahun, sehingga dapat memperlihatkan dinamika fungsi dan disfungsi bantuan dalam jangka panjang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan serta analisis data dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan, termasuk juga tindakan manusia. Pada metode ini, peneliti tidak menghitung atau pengolahan data dalam bentuk angka, sehingga analisis yang dilakukan tidak bersifat kuantitatif (Afrizal, 2014:13).

Dalam pendekatan kualitatif, manusia dipandang sebagai subjek yang aktif, bukan sekadar objek penelitian. Pendekatan kualitatif dipakai untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam yang bersifat subjektif serta melihat perilaku manusia dan proses yang memengaruhi terjadinya perilaku tersebut (Afrizal, 2014:12). Pada penerima bantuan PKH komponen pendidikan, cara KPM dalam menggunakan bantuan tidak hanya dilihat dari sisi pengeluaran, melainkan pemanfaatan bantuan

juga diamati dari cara berpikir, pengalaman makna yang dirasakan, nilai dan budaya yang membentuk kehidupan mereka.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu menganalisis serta mendeskripsikan pemanfaatan bantuan PKH komponen pendidikan di Kelurahan Campago Ipuh. Metode ini dipilih karena terdapat fenomena atau peristiwa lebih mudah dimaknai apabila dijelaskan melalui kata-kata, bukan secara angka. Pemanfaatan bantuan dipandang sebagai realitas sosial yang bersifat subjektif, atau yang muncul dari pengalaman KPM itu sendiri. Pemanfaatan bantuan memiliki fungsi yang disadari serta terdapat pula fungsi tersembunyi yang tidak disadari. Setiap orang ketika menggunakan bantuan pasti memiliki tujuan tertentu, namun dalam proses interaksi sosial sering muncul pula dampak lain yang tidak direncanakan. Tindakan manusia tidak hanya menghasilkan apa yang dimaksudkan, tapi bisa menimbulkan konsekuensi yang tak terduga (Ritzer, G et al., 2010).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendapatkan data melalui lisan, tulisan, maupun tindakan informan yang diamati di lapangan. Metode penelitian kualitatif tipe deskriptif ini berguna untuk memahami lebih dalam pengalaman yang benar dialami dan disadari oleh individu (Putri & Putra, 2024). Dengan demikian, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif tipe deskriptif ini agar dapat mengetahui lebih mendalam mengenai pemanfaatan bantuan PKH komponen pendidikan.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian diperlukan sebagai sumber data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Informan adalah individu yang memberikan informasi, baik mengenai dirinya sendiri, orang lain, suatu peristiwa, atau hal tertentu, kepada peneliti atau pewawancara dalam proses penelitian mendalam. Dengan kata lain, informan adalah pihak yang memiliki pengetahuan atau informasi yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

Menurut (Afrizal, 2014) dalam penelitian kualitatif informan penelitian dapat terbagi menjadi dua yaitu:

a). Informan pelaku

Informan pelaku adalah informan yang memberikan informasi mengenai dirinya sendiri, termasuk tindakan, pikiran, pandangan, pengalaman yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, cara yang digunakan dalam menentukan informan adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel data dengan suatu pertimbangan tertentu (Sugiono, 2017). Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* adalah membantu peneliti fokus pada informan yang memiliki pengalaman yang berkaitan dengan penelitian, Peneliti menetapkan kriteria agar data yang diperoleh lebih mendalam dan data yang dicari dapat terpenuhi mengenai pemanfaatan bantuan PKH komponen pendidikan. Maka dalam penelitian ini terpilih sebanyak 6 keluarga penerima manfaat dengan kriteria informan pelaku terdiri dari:

1. KPM yang lebih dari 5 tahun menerima bantuan PKH komponen pendidikan
2. Tidak mempunyai pekerjaan tetap

3. Penghasilan tidak cukup membiayai anak sekolah
4. Kondisi rumah semi permanen
5. Mempunyai anak yang masih sekolah di jenjang SD, SMP atau SMA

Tabel 1.7
Data Informan Pelaku

No	Kelompok PKH	Nama Penerima (Samaran)	Usia (Tahun) KPM	Menerima Bantuan (Tahun)	Tingkat Sekolah Anak	Penyaluran Bantuan
1.	PKH Anyelir	Erma Rita/ER	51	2019-2025	Kelas 2 SMP	Pos
2.	PKH Melati	Siti Jamila /SJ	41	2017-2025	Kelas 2 SMP	Himbara
3.	PKH Cantika	Yunisa/Y	43	2019-2025	Kelas 1 SMA	Pos
4.	PKH Sakura	Ola Nadia/ON	36	2019-2025	Kelas 6 SD dan 2 SMP	Pos
5.	PKH Sehati	Merianti /M	47	2017-2025	Kelas 1 SMP dan 1 SMK	Pos
6.	PKH Sehati	Windi/W	30	2018-2025	Kelas 5 SD	Himbara

Sumber: Data Primer, 2025

b). Informan pengamat

Informan pengamat adalah individu yang memberikan penjelasan dari apa yang ia lihat, dengar, amati terhadap kehidupan KPM, tanpa pengalaman pribadi. Dalam penelitian ini, mereka adalah orang yang melihat langsung kondisi sosial ekonomi KPM, sehingga dapat memberi wawasan, informasi tentang pemanfaatan bantuan PKH komponen pendidikan di Kelurahan Campago Ipuh tersebut. Maka informan pengamat dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pendamping PKH yang masih aktif menjalankan tugas di Kelurahan Campago Ipuh
2. Koordinator Pendamping PKH Kota Bukittinggi

3. Kader Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan Campago Ipuh
4. Ketua RT dan RW di Kelurahan Campago Ipuh
5. Bundo Kanduang

Tabel 1.8
Data Informan Pengamat

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1.	Fadhl Iibnu Yasien	38	S1	Koordinator PKH Kota Bukittinggi
2.	Riri Helsa	40	S1	Pendamping PKH Kelurahan Campago Ipuh
3.	Asnul Harun	65	SMA	Ketua RW (RT 02/RW 02) Kelurahan Campago Ipuh
4.	Dedi Suhada	51	S1	Ketua RT (RT 02/RW 02) Kelurahan Campago Ipuh
5.	Mulyiana	53	S1	Kader PSM Kelurahan Campago Ipuh
6.	Fadilah	60	SMA	Bundo Kanduang

Sumber: Data Primer, 2025

1.6.3 Data yang Diambil

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, baik dalam bentuk tulisan, ucapan, serta tindakan manusia. Penelitian ini tidak berfokus pada upaya untuk mengkuantifikasi data yang diperoleh (Afrizal, 2014). Berdasarkan sumbernya, data dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Data primer merupakan informasi yang didapatkan langsung melalui hasil wawancara mendalam pada informan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan pelaku (KPM penerima bantuan PKH komponen pendidikan) dan informan pengamat (Pendamping PKH, Koordinator Pendamping PKH, Ketua RT/RW, kader PSM, serta bundo kanduang). Data primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui

wawancara mendalam dengan informan untuk mendapatkan informasi tentang pemanfaatan bantuan PKH komponen pendidikan.

2. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder sebagai pendukung dan pelengkap data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi PKH dari Dinas Sosial, pedoman pelaksanaan PKH, data rekapan kelurahan, jurnal, artikel, web resmi Kemensos RI, Badan Pusat Statistik (BPS), serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga dapat memperkuat informasi yang didapatkan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian karena digunakan untuk mendapatkan informasi dari pengumpulan data-data yang dibutuhkan peneliti agar tujuan penelitian dapat tercapai (Sugiono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Menurut (Afrizal, 2014), wawancara mendalam adalah salah satu metode pengumpulan data melalui interaksi sosial berupa percakapan antara peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait penelitian. Wawancara mendalam dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dan informan untuk mengumpulkan informasi. Agar data lebih akurat, wawancara dilakukan berulang untuk memperjelas dan mengonfirmasi hasil sebelumnya. Informan utama adalah KPM, khususnya ibu sebagai pengelola dana PKH pendidikan, sementara

pihak lain yang mengenal KPM turut diwawancara untuk melengkapi data. Wawancara dilakukan berdasarkan kesepakatan waktu dan tempat dengan informan.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan fenomena yang terjadi pada objek penelitian secara sistematis (Rahmadi, 2011). Observasi dilakukan secara langsung di lokasi dan waktu kejadian untuk memperoleh kondisi nyata situasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan menghadiri langsung pertemuan kelompok PKH komponen pendidikan di rumah-rumah KPM. Melalui kegiatan P2K2, peneliti mencatat data KPM yang hadir, seperti lama menerima bantuan, jenis bantuan, dan mekanisme penyalurannya. Dari hasil pendataan tersebut, teridentifikasi enam KPM yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun dan kemudian dipilih sebagai informan. Peneliti selanjutnya mengamati kondisi rumah, situasi sosial ekonomi, serta pola pemanfaatan dana bantuan PKH, baik untuk kebutuhan pendidikan anak maupun untuk keperluan lainnya.

3. Studi Dokumen

Menurut Afrizal (2014), studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai bahan tertulis, seperti berita media, notulen, surat, dan laporan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah surat izin penelitian, rekapan laporan resmi pendamping PKH, rekapan data Lurah Campago Ipuh, buku untuk mencatat jawaban informan, foto rumah KPM, stiker penerima bantuan PKH, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku monitoring/ pencatatan pengeluaran KPM.

1.6.5 Proses Penelitian

Proses dalam pengumpulan data penelitian dimulai sejak bulan Maret hingga Juni tahun 2025. Diawali pada tanggal 27 Maret 2025, peneliti menyerahkan surat izin penelitian ke Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi. Setelah ditandatangani Kepala Kesbangpol, surat tersebut menjadi bukti izin penelitian di Kelurahan Campago Ipuh. Setelah menerima izin, tanggal 10 April 2025 peneliti menghubungi pendamping PKH, Ibu Riri Helsa, untuk menanyakan jumlah penerima manfaat PKH komponen pendidikan tahun 2025. Ibu Riri menyarankan peneliti langsung mengikuti pertemuan kelompok PKH di lapangan agar lebih mudah mengenal KPM dan melakukan wawancara penerima bantuan yang sedang berjalan tersebut.

Peneliti mengikuti pertemuan PKH kelompok 1–5 mulai tanggal 11 April 2025 sampai 22 April 2025 untuk observasi sekaligus wawancara dengan KPM serta pendamping PKH. Tanggal 24 April 2025, peneliti mendatangi Dinas Sosial untuk mendapatkan data mengenai KPM melalui operator SIKS-NG dan peneliti bertemu dengan Koordinator PKH Kota Bukittinggi saat itu peneliti meminta izin untuk mewawancarai beliau dan bersedia diwawancarai. Tanggal 25 April, peneliti mendatangi rumah Ibu SJ (PKH Melati) dan berlangsung saat itu tanya jawab dengan peneliti, lalu tanggal 27 April dengan Ibu W (PKH Sehati) peneliti mendatangi rumah nya, sesampai di rumah nya beliau, peneliti mewawancarainya.

Tanggal 7 Juni 2025, peneliti mengunjungi rumah Ibu Muliyana (PSM), namun beliau tidak berada di rumah. Pada tanggal 8 Juni 2025, peneliti kembali dan mewawancarai Ibu Muliyana yang sedang menjahit di ruang tamu. Beliau banyak memberikan informasi tentang KPM berdasarkan pengalamannya sebagai PSM dan

keterlibatannya dalam survei bersama pendamping PKH. Tanggal 9 Juni 2025, peneliti mendatangi rumah Ketua RT Bapak Dedi Suhada, namun beliau tidak ada. Ibunya memberi tahu lokasi tempat kerja, peneliti langsung menemuinya di sana. Setelah memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan wawancara dilakukan terbatas waktu karena beliau sedang bekerja, menyarankan peneliti untuk menemui Bapak RW. Sore hari itu, peneliti mengunjungi rumah Bapak Asnul Harun (RW), namun beliau tidak berada di rumah. Tanggal 10 Juni 2025, peneliti kembali mendatangi rumah Bapak RW, namun saat anaknya mengatakan bahwa bapak sedang menghadiri pertemuan di Balai Diklat Pertanian. Peneliti langsung menuju ke sana kemudian menunggu hingga acara selesai dan berhasil mewawancarai Bapak Asnul Harun meskipun terbatas waktu karena ada agenda lain yang mengharuskan beliau hadiri. Sore harinya, peneliti ke rumah Ibu Y (PKH Cantika), tetapi beliau tidak ada. Malamnya peneliti kembali mendatangi rumah Ibu Y, dan bersedia diwawancarai setelah beliau memasak.

Tanggal 11 Juni 2025 pukul 15.00, peneliti mendatangi rumah Bundo Kanduang, namun beliau tidak berada di tempat. Setelah dihubungi melalui nomor telepon keluarga, sekitar pukul 17.30 beliau pulang dan bersedia diwawancarai. Keesokan harinya, tanggal 12 Juni 2025, peneliti melewati rumah Ibu M (PKH Sehati) dan meminta izin untuk wawancara, beliau meluangkan waktu untuk diwawancarai. Pada tanggal 13 Juni 2025, peneliti mendatangi rumah Ibu ON (PKH Sakura) untuk diwawancarai, beliau memberikan berbagai informasi terkait pemanfaatan bantuan. Besoknya, tanggal 14 Juni 2025 pukul 10.00 pagi peneliti mendatangi rumah Ibu ER, namun tidak bertemu. Sore pukul 15.00 peneliti

kembali, dan Ibu ER menerima wawancara dengan ramah. Kendala dalam penelitian ini yaitu saat turun lapangan, peneliti mendatangi rumah KPM satu per satu karena sebagian tidak memiliki ponsel, peneliti menanyakan alamat KPM ke tetangga. Selain itu, peneliti juga mengalami kesulitan menyesuaikan waktu wawancara dengan informan.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis merupakan fokus utama yang dikaji dalam sebuah penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian kualitatif, unit analisis diperlukan untuk memfokuskan kajian dan menentukan kriteria objek yang diteliti. Unit analisis menjelaskan siapa atau apa yang menjadi fokus pengumpulan data. Dapat berupa individu, kelompok, organisasi, maupun waktu tertentu sesuai topik penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah individu, yaitu ibu sebagai pemegang dan pengelola dana bantuan PKH komponen pendidikan bagi anaknya. Dengan memilih individu sebagai unit analisis dalam penelitian ini ialah untuk memahami sudut pandang masing-masing KPM dalam penggunaan dana bantuan pendidikan sehingga diperoleh gambaran yang lebih mendalam dan spesifik sesuai dengan tujuan penelitian.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data mentah, seperti pernyataan, tindakan, catatan lapangan dan dokumen tertulis lainnya, untuk mengidentifikasi bagian-bagian data serta hubungan antar bagian dan keseluruhan data yang dikumpulkan, dengan tujuan menghasilkan klasifikasi, sehingga membantu peneliti menemukan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian (Afrizal, 2014).

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan peneliti yaitu metode Miles dan Huberman yang membagi proses analisis data kualitatif menjadi tiga tahapan yaitu pertama, Tahap Kodifikasi Data adalah data yang telah dikumpulkan di lapangan kemudian disusun kembali, diberi penamaan atau pengkodean tertentu pada data yang didapatkan tersebut. Informasi yang diperoleh selama penelitian merupakan kumpulan data yang relevan dan bermanfaat sesuai dengan fokus penelitian. Pernyataan informan yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian maka data itu tidak penting (Afrizal, 2014). Kemudian Tahap Penyajian Data adalah di tahap ini peneliti menyajikan hasil penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Peneliti menggunakan matriks untuk menyajikan temuan penelitian agar lebih efektif dan mudah dipahami. Selanjutnya, Tahap Penarikan Kesimpulan, adalah tahap verifikasi, merupakan proses peneliti menarik kesimpulan dari temuan data sebagai hasil interpretasi terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan disusun, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap proses kodifikasi dan penyajian data sebelumnya untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya suatu penelitian tidak hanya merujuk pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal,2014). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Kelurahan ini dipilih karena pada tahun 2024 jumlah penerima PKH di Campago Ipuh cenderung meningkat dibandingkan kelurahan lain di Kota Bukittinggi. Selain itu, terdapat penerima PKH

komponen pendidikan yang telah menerima bantuan lebih dari lima tahun namun belum mandiri (graduasi). Selain itu, kuatnya nilai adat dan kekerabatan masyarakat Minangkabau (Kurai) menjadikan Campago Ipuh sebagai lokasi yang relevan untuk memahami bagaimana bantuan PKH pendidikan dimaknai dan dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat.

1.6.9 Defenisi Operasional Konsep

a. Pemanfaatan Bantuan Sosial

Sebuah proses penggunaan dana atau fasilitas yang diberikan pemerintah meringankan beban ekonomi keluarga penerima bantuan yang mana mereka memaksimalkan penggunaan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan kesejahteraan keluarga.

b. Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Rumah tangga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan bantuan sosial ditandai dengan penghasilan rendah, pekerjaan tidak tetap, serta terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, kesejahteraan sehingga membutuhkan dukungan melalui bantuan.

c. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial bersyarat dari Kementerian Sosial yang diberikan kepada keluarga miskin atau rentan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi beban biaya hidup, mendorong kemandirian, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial.

d. PKH Komponen Pendidikan

Bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin agar anak tetap bersekolah dari tingkat dasar hingga menengah, dengan tujuan mendukung biaya pendidikan dan meningkatkan peluang anak memperoleh masa depan yang lebih baik.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan waktu 10 bulan agar dapat tercapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, disusunlah jadwal penelitian agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Penelitian ini berlangsung dari bulan Februari Tahun 2025 hingga bulan November Tahun 2025, lebih jelasnya dapat ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 1.9
Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	Tahun 2025									
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov
1.	Seminar Proposal										
2.	Menyusun Instrumen Penelitian										
3.	Pengumpulan Data										
4.	Analisis Data										
5.	Penulisan Laporan & Bimbingan										
6.	Ujian Skripsi										

Sumber: Data Primer, 2025